

**POTRET KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK
(Studi Tentang Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir
Kecamatan Pontianak Timur)**

**Oleh:
FIRDIS
NIM. E51110039**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak, 2015. E-mail: firdisfalhum@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir serta mendeskripsikan bentuk kemiskinan yang terjadi pada masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Hilir. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, menggunakan indikator dalam memahami kemiskinan. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemiskinan yang terjadi di kelurahan Tanjung Hilir adalah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh faktor struktural seperti, sistem kebijakan pemerintah yang tidak optimal dalam menjalankan program yang tertuang dalam RPJM maupun program PKH sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pemerataan pembangunan berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kurangnya peluang kerja, rendahnya akses masyarakat terhadap permodalan. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membangun konsep baru yang berkaitan dengan kemiskinan. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber informasi bagi pemerintah, dalam melihat daerah yang menjadi sasaran pembangunan.

Kata-kata Kunci : Kemiskinan Struktural, Sistem Kebijakan, RPJM, PKH

Menjadi negara maju tentu menjadi harapan masyarakat semua negara, tak terkecuali Indonesia. Dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 249 juta jiwa tentu menjadi potensi penggerak bagi pembangunan. Harapan tersebut kemudian coba diwujudkan melalui berbagai upaya pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Namun dalam prosesnya, pembangunan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti misalnya masalah sosial.

Masalah sosial tersebut dapat berbagai macam bentuk, namun salah satu masalah sosial yang berpotensi menghambat pembangunan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan memang masalah serius, dan di khawatirkan membawa dampak negatif, seperti kriminalitas, perdagangan narkoba, eksploitasi anak, masalah kesehatan dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional pada September tahun 2013, jumlah masyarakat miskin di Indonesia berkisar 28,55 juta jiwa atau 11,47%

dari populasi penduduk berkisar 249 juta jiwa (BPS, 2013).

Gambaran kemiskinan juga tampak di beberapa kawasan di Kota Pontianak. Seperti di kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur. Jika kita merujuk pada data kemiskinan di kawasan tersebut, tampak masih banyak masyarakat yang di kategorikan miskin. Hal ini dapat di lihat dari data yang di himpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Pontianak pada tahun 2013, bahwa di kelurahan Tanjung Hilir terdapat 39 keluarga dalam kategori keluarga Pra Sejahtera atau tergolong sangat miskin serta 644 keluarga yang dikategorikan dalam keluarga sejahtera 1 atau keluarga yang tergolong miskin, dan total 683 keluarga miskin dari jumlah keluarga sebesar 3262 keluarga atau 20,93 % dari total keluarga di kelurahan tersebut (BPS, 2013).

Dalam berbagai upaya, program pembangunan bagi masyarakat miskin tetap menjadi prioritas pemerintah di berbagai daerah sebagaimana juga yang tertuang dalam

amanat *Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3* yaitu: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, dan Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Serta Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak (UUD 1945). Berdasarkan landasan tersebut, mengandung arti bahwa masyarakat miskin juga memiliki hak untuk hidup sejahtera, dengan mendapatkan hak-haknya dari negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak mendapatkan bantuan, khususnya bantuan sosial ekonomi, yang nantinya dapat menjadi modal untuk memberdayakan masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin, masih sulit mendapatkan akses sosial dan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kemiskinan

Leviton (1980 dalam Nawawi 2009) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Definisi lain yang menjelaskan tentang kemiskinan adalah menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu : kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Samosir, 2012). Sedangkan berdasarkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), kemiskinan diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar yang memadai, kualitas perumahan yang di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup multidimensi, yaitu dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan aset (Suparyanto, 2011).

2. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronik dan kemiskinan. Kemiskinan kronis diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, terbatasnya sumber daya dan keterisolasian, rendahnya taraf pendidikan, kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, maupun ketidakberdayaan masyarakat. Sedangkan kemiskinan sementara umumnya disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan, bencana alam atau dampak dari kebijakan (Samosir, 2012).

3. Bentuk Kemiskinan

Menurut Suryawati, kemiskinan dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural (Suryawati,

2005). Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan yang layak, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak merata, sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Kemiskinan kultural, disebabkan oleh sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, perilaku konsumtif, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada dalam sistem sosial, kebijakan politik kurang serius dalam mendukung pengentasan kemiskinan,

4. Karakteristik Masyarakat Miskin

Badan Pusat Statistik tahun 1992 mengemukakan karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari

jumlah pekerja dalam satu rumah tangga, kondisi tempat tinggal, pemilikan dan penguasaan tanah (pertanian), tingkat pendidikan dan jam kerja kepala rumah tangga, serta jenis dan status pekerjaan rumah tangga. Dikemukakan pertama-tama bahwa rumah tangga miskin hanya mempunyai satu orang pekerja yang menghasilkan pendapatan. Sebagian besar kondisi tempat tinggal mereka belum memenuhi persyaratan kesehatan yang memadai. Rumah tangga miskin hanya memiliki lahan yang kecil atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Tingkat pendidikan kepala rumah tangganya rendah. Jam kerja mereka rata-rata per minggu relatif lebih lama. Jenis dan status pekerjaan di perkotaan berupa usaha kecil-kecilan, terutama sektor informal (Kamaluddin, 2004).

5. Jenis Kemiskinan

Menurut Suryawati

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (Suryawati, 2005).

6. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006, dalam Waskitho, 2010) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, rendahnya akses dan mutu layanan kesehatan, rendahnya akses dan mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepemilikan tanah, buruknya kondisi lingkungan dan sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan akibat besarnya tanggungan.

7. Penyebab Kemiskinan Struktural

Menurut Jamasy (2004) kemiskinan struktural diartikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan

yang belum merata sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

Handoyo (2012) mengemukakan lima faktor penyebab kemiskinan struktural, yaitu :

1. Struktur sosial masyarakat yang menyebabkan sekelompok orang berada pada lapisan miskin. Keluarga miskin memiliki lahan yang sempit, atau bahkan tidak punya. Anak yang lahir dari keluarga miskin, sejak awal sudah mewarisi kemiskinan. Mereka sulit mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas diri dan hidupnya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang sama dengan generasi sebelumnya.
2. Praktek ekonomi masih jauh dari nilai moral Pancasila yang bertumpu pada kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan.
3. Pasal 33 UUD 1945 masih belum efektif untuk diterjemahkan dalam

peraturan organik yang lebih operasional untuk mengatur praktek kegiatan ekonomi.

4. Paradigma ekonomi masih bertumpu pada ekonomi neoliberal yang kapitalistik. Dalam peradaban global diakui bahwa pengaruh ekonomi kapitalistik demikian besar.
5. Konsistensi terhadap nilai moral Pancasila masih kurang. Pancasila mengajarkan praktek ekonomi yang demokratis, berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan, dan menempatkan posisi negara sebagai entitas yang penting sebagai regulator dan eksekutor. Namun, kenyataannya praktek ekonomi lebih berpihak kepada ekonomi kapital dari pada rakyat. Nasib ekonomi kerakyatan menjadi kurang jelas.

8. Teori Struktural Fungsional

Konsep utama Struktural Fungsional adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan dalam keseimbangan. Pandangan dasarnya bahwa setiap

struktur dalam sistem sosial, fungsional bagi yang lain. Teori ini hanya melihat kepada sumbangan satu sistem terhadap sistem yang lain dan mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Parsons (dalam Ritzer, 2004) sebagai tokoh Fungsionalisme Struktural mengemukakan empat fungsi untuk semua sistem dan terkenal dengan istilah AGIL. Fungsi tersebut ialah **Adaptation**, **Goal Atteinment**, **Integration**, dan **Latency**.

Adaptation, Sistem tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

Goal Atteinment, Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan.

Integration, Sistem harus mampu mensinergiskan antar komponen dalam sistem dan ketiga fungsi yang lain (**Adaptation**, **Goal Atteinment**, **Latency**).

Latency, Sistem harus memperlengkapi, memelihara dan

memperbaiki, motivasi individual, pola kultural, yang menciptakan dan menopang motivasi.

AGIL digunakan pada bahasan empat sistem tindakan. Organisme perilaku ialah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sistem sosial menjalankan fungsi integrasi dengan menghubungkan setiap komponennya yaitu A,G,L. Sedangkan sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola (Ritzer, 2004). Dalam kaitannya dengan Fungsionalisme Struktural, kemiskinan terjadi dikarenakan ketidakberdayaan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem.

Struktural fungsional melihat kemiskinan sebagai akibat disfungsinya sistem dalam masyarakat yang tergambar dari hilangnya

kesempatan mengakses sumber ekonomi, pendidikan, kesehatan, produksi, aset, hasil produksi maupun jaminan sosial. Disfungsinya sistem pemerintah ditandai dengan tidak optimalnya pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian ini adalah Kelurahan Tanjung Hilir, yang memang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Minimnya sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dilakukan, dengan menggunakan teknik *Purposive*, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini informan di bagi dua, yaitu informan pangkal dan informan kunci. informan pangkal dan informan kunci yang di maksud adalah:

- Dinas Sosial, Bappeda Kota Pontianak, Kelurahan, Kecamatan.
- Masyarakat miskin di kelurahan Tanjung Hilir.

Adapun yang objek dalam penelitian ini adalah Kemiskinan Masyarakat Di Kawasan Kelurahan Tanjung Hilir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

Observasi : Peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati bagaimana kehidupan masyarakat miskin di kelurahan Tanjung Hilir.

Wawancara : Objek wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin, Dinas Sosial, Bappeda Kota

Pontianak, pejabat Kelurahan, Kecamatan.

Dokumentasi : Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dilapangan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

Reduksi data : yaitu menyaring data yang diperoleh dilapangan kemudian dituliskan kedalam bentuk laporan terperinci, laporan tersebut di reduksi, di rangkum, di pilih, difokuskan, di susun lebih sistematis.

Penyajian Data : yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan informasi, untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

Verifikasi : yaitu proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah (Sugiyono, 2009).

PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Gambaran Program Pemerintah

Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2010 – 2014

yang telah dirumuskan disusun menjadi landasan dasar dalam menentukan langkah pembangunan Kota Pontianak. Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis** yaitu:

Upaya pemberian pembiayaan kesehatan pada masyarakat miskin dalam bentuk asuransi kesehatan. Penyediaan 6 Puskesmas rawat inap dan pelayanan dokter spesialis. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Mengoptimalkan posyandu untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Penyediaan rumah sakit tipe C di Kota Pontianak. Memperbanyak dokter spesialis di puskesmas. Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan dan reproduksi remaja. Peningkatan pelayanan keluarga berencana. Peningkatan layanan kesehatan terkait Narkoba, HIV dan AIDS. Memberikan pendidikan gratis bagi keluarga miskin. Mendorong pengembangan kualitas anak didik

dalam pembinaan iman dan taqwa, mental dan spiritual. Memberikan kesempatan pada anak terlantar dan jalanan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Mengoptimalkan dan membentuk balai pelatihan teknologi padat karya di setiap kelurahan bekerjasama dengan LPM. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan. Membangun sarana dan prasarana untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Mewujudkan sekolah berstandar nasional dan internasional untuk SMP, SMA dan SMK. Mengembangkan pendidikan berbasis lapangan kerja. Meningkatkan budaya toleransi di masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan.

Arah kebijakan pembangunan yang juga dilaksanakan untuk **Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda** yaitu: Pemberian pelatihan dan modal bergulir untuk industri rumah tangga. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut dalam kancah politik. Memberikan perhatian kepada

organisasi yang membela permasalahan kaum perempuan. Menekan angka KDRT dan menyediakan pusat konsultasi. Meningkatkan persentase pegawai perempuan dalam jabatan struktural. Memberikan pelatihan dan kemudahan akses permodalan kepada organisasi kepemudaan. Memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi. Menjadikan kelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam menangani masalah di Kota Pontianak. Sedangkan arah kebijakan yang ditempuh dalam **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran** yaitu:

Percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan/kecamatan. Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, SDM pariwisata, kualitas produk dan pelayanan pariwisata. Penataan ODTW yang berbasis tepian sungai. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat padat karya di sektor

sekunder dan tersier. Menyediakan tempat berusaha bagi pedagang informal. Memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk home industri. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan serta peternakan. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pangan yang dilakukan melalui pengembangan cadangan pangan daerah. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Merevitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Memberikan kemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi. Membentuk kelompok usaha bagi siswa SMK. Memberikan insentif untuk investasi yang menyerap tenaga kerja.

Adapun program penanggulangan kemiskinan yang menjadi andalan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dan

diwajibkan melaksanakan persyaratan yang telah ditetapkan. Program ini, bertujuan mengurangi beban warga miskin dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Secara khusus, tujuan PKH adalah: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, balita dan anak prasekolah anggota rumah tangga miskin. Adapun besaran bantuan PKH yaitu Rp 1.287.000 / tahun.

Bentuk Kemiskinan Masyarakat Kelurahan Tanjung Hilir

Dengan melihat paparan yang berkaitan dengan faktor penyebab kemiskinan, maka penulis mengindikasikan bahwa kemiskinan yang terjadi di kelurahan Tanjung Hilir mengarah kepada bentuk kemiskinan struktural. Menurut (Nugroho, 2001) Kemiskinan struktural diartikan sebagai akibat dari super-struktur yang

menyebabkan tidak adanya pemerataan pembangunan tidak berkembangnya kualitas sumber daya manusia. Pernyataan ini menguatkan bahwa tidak adanya pemerataan pembangunan di kelurahan Tanjung Hilir terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Faktor struktural merupakan penyebab masyarakat Tanjung Hilir tetap miskin dan sulit lepas dari kemiskinan. Faktor struktural tersebut antara lain: Program pemerintah yang tidak maksimal dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dalam pendidikan, kesehatan, penciptaan peluang kerja baru, sulitnya akses permodalan, sarana ekonomi yang kurang dan lain-lain.

Pernyataan bahwa kemiskinan di kelurahan Tanjung Hilir merupakan bentuk kemiskinan struktural diperkuat dengan melihat penyebab kemiskinan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penulis melihat bahwa permasalahan kemiskinan ini merupakan bentuk kemiskinan

struktural dengan menganalisis masalah tersebut dengan pendekatan Struktural Fungsional. Masalah kemiskinan di kelurahan Tanjung Hilir berkaitan antara fungsi yang di kemukakan Parsons dengan sistem kebijakan pemerintah. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), telah diterapkan pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis. Tetapi adanya temuan yang memperlihatkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Tanjung Hilir tidak terlepas dari tidak maksimalnya fungsi pemerintah dalam struktur sosial. Hal tersebut diperkuat dari tinjauan Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Parsons (dalam Ritzer, 2004) berkaitan dengan fungsi adaptasi yang menguatkan bahwa gagalnya sistem kebijakan yang tertuang dalam program pemerintah belum mampu menyediakan kesempatan pendidikan bagi

masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.

Masih banyaknya penduduk yang hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar, tidak tamat sekolah dasar dan bahkan tidak mengenyam bangku sekolah yaitu sebanyak 3575 orang ataupun masih adanya masyarakat yang tidak mampu menamatkan SD yaitu 863 dan pendidikan SLTP dan SLTA yaitu sebanyak 1142 orang dan 1621 orang. Rendahnya akses pendidikan menunjukkan bahwa sistem kebijakan pemerintah dengan program keluarga harapan masih belum mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kecilnya nilai bantuan juga tidak mampu memaksimalkan akses masyarakat pada pelayanan sosial. Pendapat Parsons terkait fungsi pencapaian tujuannya menguatkan pandangan penulis bahwa kegagalan sistem kebijakan dalam menjalankan fungsi pencapaian tujuan terlihat dari tidak seriusnya sistem kebijakan pemerintah dalam melakukan pemerataan

pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan untuk kawasan kelurahan Tanjung Hilir. Masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan di kelurahan Tanjung Hilir terlihat dari tidak adanya prasarana pendidikan seperti SMP maupun SMA dan SMK di kelurahan ini. Adapun prasarana pendidikan di kawasan ini adalah SD sebanyak 5 unit.

Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Lipton (1977 dalam Bahrum, 2011) dengan istilah "*mal-distribution with growth*" yakni gagalnya upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan akan menimbulkan kondisi dimana orang miskin akan terbelenggu kemiskinan.

Adanya indikasi kemiskinan juga terlihat dari tidak meratanya kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana kesehatan di kelurahan Tanjung Hilir, yang di dasarkan dari data dilapangan bahwa kelurahan Tanjung Hilir tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti

Puskesmas ataupun rumah sakit adapun fasilitas kesehatan yang ada di kawasan ini hanya Posyandu sebanyak 4 unit dan Puskesmas pembantu 1 unit. Sedangkan tenaga medis juga masih sangat kurang dengan hanya 1 bidan 2 perawat dan 6 dukun bersalin.

Meskipun program keluarga harapan memberikan bantuan bagi peningkatan akses layanan kesehatan tetapi menjadi tidak maksimal disebabkan kurangnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Seperti yang dikemukakan Suryawati (2005) bahwa kemiskinan tidak terlepas dari kebijakan politik yang kurang serius dan tidak tepat sasaran sehingga ikut berperan terhadap masih berlangsungnya kemiskinan.

Kemudian tidak berjalannya fungsi integrasi juga tampak dari tidak tersedianya data penerima jaminan kesehatan di institusi kelurahan. ini memberikan gambaran bahwa kurangnya sinergi antara institusi kelurahan dengan institusi kesehatan sehingga data warga penerima jaminan kesehatan dari program keluarga

harapan (PKH) menjadi tidak jelas. Kurangnya berjalannya fungsi integrasi antara pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan memperlihatkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan program.

Selain itu, lemahnya sistem kebijakan pemerintah dalam menjalankan rencana penurunan angka pengangguran merupakan gambaran tidak maksimalnya pemerintah dalam menjalankan fungsi adaptasi seperti menyediakan peluang kerja bagi masyarakat yang terlihat dari tingginya pengangguran di kelurahan Tanjung Hilir yang tercatat sebanyak 3022 orang.

Keberadaan PKH berupa bantuan tunai, tidak mampu menyediakan peluang kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor struktural yang berkaitan dengan kebijakan dalam menjalankan fungsi adaptasi yang dibutuhkan masyarakat telah mengakibatkan rendahnya akses pekerjaan. Pernyataan ini di perkuat

dengan pendapat Jamasy (2004) bahwa ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan warga miskin dapat bekerja telah berdampak pada tetap terbelenggunya masyarakat dalam kemiskinan.

Penyebab struktural lain adalah tidak adanya modal bagi warga miskin. Program keluarga harapan yang tidak fokus dalam memberikan modal juga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah kurang serius menjalankan fungsi pemeliharaan pola, dimana PKH yang tidak fokus pada pemberian modal tidak banyak membantu dalam menopang motivasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraaannya melalui kegiatan usaha. Masih berlangsungnya kemiskinan di Tanjung Hilir juga berkaitan dengan tidak adanya fasilitas ekonomi seperti pasar tradisional, koperasi atau pun perbankan di kawasan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tidak optimal dalam melaksanakan fungsi pencapaian tujuan yaitu pemerataan pembangunan.

seperti ungkapan Lipton (1977 dalam Bahrum, 2011) dengan istilah "*mal-distribution with growth*" yakni gagalnya upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir

1. Kebijakan Pemerintah

Meskipun kebijakan PKH telah diterapkan namun apa yang penulis temukan selama penelitian menunjukan bahwa program tersebut belum sepenuhnya optimal. Pernyataan ini berdasarkan atas masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Terlihat dari banyaknya penduduk yang hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar, tidak tamat sekolah dasar dan bahkan tidak mengenyam bangku sekolah yaitu sebanyak 3575 orang. Sedangkan masyarakat yang tidak menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 1142 dan 1621.

Masih rendahnya akses masyarakat pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan tingginya buta aksara sepertinya tidak luput dari

faktor struktural yaitu dampak kebijakan politik yang kurang serius dalam pelaksanaan PKH maupun dalam mengupayakan RPJM terkait dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun maupun Program Pendidikan Non Formal untuk buta aksara. Setidaknya ada sekitar 508 orang warga kelurahan Tanjung Hilir yang masih tergolong buta aksara dan 863 orang tidak mampu menamatkan SD.

Suryawati (2005) mengungkapkan bahwa kemiskinan struktural disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya dalam sistem sosial, kebijakan politik kurang serius dalam pengentasan kemiskinan dan kurang tepat sasaran.

Tidak optimalnya program pemerintah dalam menyediakan kesempatan akses pendidikan secara tidak langsung berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan. Seperti ungkapan Jamasy (2004) bahwa kemiskinan struktural tidak terlepas dari kebijakan yang belum menjangkau seluruh masyarakat

sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Dengan meninjau masalah diatas melalui pendekatan Struktural Fungsional Parsons (dalam Ritzer, 2004) dengan skema AGIL, menguatkan pandangan bahwa kemiskinan di Tanjung hilir berkaitan dengan fungsi adaptasi. Tidak maksimalnya fungsi adaptasi masyarakat tergambar dari rendahnya akses masyarakat pada pendidikan. Serta tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tidak mampu menyediakan sumber bagi peningkatan akses pendidikan. Pemerintah tidak maksimal dalam melaksanakan PKH maupun mengupayakan program wajib belajar dan pendidikan non formal untuk buta aksara.

Sementara itu kurangnya pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di kelurahan Tanjung Hilir juga mempengaruhi rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan PKH menjadi tidak maksimal. Seperti ungkapan Lipton (1977 dalam Bahrum, 2011) dengan istilah "*mal-distribution with growth*" yakni

gagalnya upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan akan menimbulkan kondisi dimana orang miskin akan terbelenggu kemiskinan. Terlihat dari kurangnya pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Adapun fasilitas yang terdapat di kelurahan Tanjung Hilir hanya Sekolah Dasar berjumlah 5 unit dengan 55 tenaga pengajar. Dalam kaitannya fungsi pencapaian tujuan menguatkan pandangan bahwa kemiskinan di Tanjung Hilir mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi pencapaian tujuan, yang mengakibatkan tujuan pemerataan pembangunan pendidikan tidak tercapai.

Faktor struktural lain adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan kesehatan yang terlihat dari rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis. Data menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Tanjung Hilir masih kurang. Adapun fasilitas yang ada yaitu Posyandu berjumlah 5 unit dan

Puskesmas pembantu 1 unit, sedangkan tenaga kesehatan yaitu 6 dukun bersalin 1 bidan dan 2 perawat. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH yang hanya sebatas memberikan bantuan tetapi pelaksanaannya tidak di dukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

2. Struktur Sosial

Jamasy (2004) mengungkapkan bahwa kemiskinan struktural terjadi karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan bagi warga miskin untuk dapat bekerja.. Tetapi kondisi dilapangan memperlihatkan bahwa pengangguran masih cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa struktur masyarakat kota masih belum membuka peluang kerja bagi masyarakat miskin di Tanjung Hilir.

Berkaitan dengan pendapat Parsons (dalam Ritzer, 2004) tentang fungsi adaptasi, maka permasalahan pengangguran di kelurahan Tanjung Hilir merupakan pengaruh dari tidak maksimalnya sistem kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi adaptasi dimana pemerintah tidak

mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat terkait penyediaan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat.

Faktor struktural penyebab kemiskinan adalah seperti ungkapan Suryawati (2005) yaitu rendahnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya dalam sistem sosial dikarenakan kebijakan kurang membantu meningkatkan akses masyarakat. PKH yang hanya memberikan bantuan tunai kurang membantu masyarakat. Kecilnya nilai bantuan, serta tidak adanya insentif modal usaha dan pelatihan mengakibatkan masyarakat miskin sulit meningkatkan kesejahteraan. Adapun RPJM yang berkaitan dengan pemberian pelatihan dan modal untuk industri rumah tangga tidak diupayakan secara optimal.

Berkaitan dengan fungsi pemeliharaan pola. Masih adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah akibat dari sistem kebijakan yang masih tidak serius menjalankan fungsinya dalam pemeliharaan pola.

Kebijakan PKH yang tidak membantu kebutuhan permodalan masyarakat miskin menjadi tidak efektif sehingga kurang membantu dan menopang motivasi masyarakat yang ingin membuka usaha.

Minimnya sarana perekonomian di Tanjung Hilir menunjukkan bahwa pemerintah tidak optimal dalam melakukan pemerataan pembangunan. Pembangunan industri perekonomian yang tumbuh pesat di pusat kota tidak di iringi dengan pembangunan sarana perekonomian di Tanjung Hilir sehingga hanya bersifat "urban bias" yakni hanya terkonsentrasi di pusat kota.

3. Konsistensi

Menurut Handoyo (2012), kemiskinan struktural merupakan masalah yang bersifat majemuk dan disebabkan oleh multi faktor. Salah satunya adalah masalah konsistensi. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah kurangnya konsistensi pemerintah dalam penerapan nilai moral Pancasila. Pancasila mengajarkan praktek ekonomi yang demokratis, berkeadilan, efisien, dan

berkelanjutan, dan menempatkan posisi negara sebagai entitas penting sebagai regulator dan eksekutor. Penjabaran nilai luhur tersebut secara jelas tersurat dan tersirat dalam UUD 1945.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anggota masyarakat khususnya di kelurahan Tanjung Hilir yang tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan UUD 1945 terkait dengan pelayanan pendidikan kurang optimal. Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.

Konsistensi yang kurang dalam pelaksanaan UUD juga menjadi

persoalan. Berdasarkan temuan bahwa keberadaan fasilitas umum di Tanjung Hilir seperti kesehatan, pendidikan ataupun ekonomi masih kurang. Ini menunjukkan bahwa konsistensi pemerintah sangat diperlukan dalam melaksanakan amanat UUD 1945 terkait penyediaan fasilitas umum.

Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 2 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Amanat UUD tersebut jelas mengatur bahwa pemberian jaminan sosial bagi masyarakat, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Tidak konsistensinya pelaksanaan aturan tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat miskin yang tidak menerima jaminan sosial.

Adapun pasal 33 ayat 2, dan 3 yang berbunyi : Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun kekayaan alam Indonesia melimpah tetapi dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan konsisten.

Seperti yang di kemukakan oleh Handoyo (2012) bahwa Pasal 33 UUD 1945 terkait dengan peran pemerintah dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam prakteknya masih belum konsistensi dilaksanakan. Sejumlah Undang-Undang Organik dan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga tinggi Negara tidak serta merta menyelesaikan masalah kesejahteraan. Kenyataannya masih tingginya penduduk miskin di Tanjung Hilir mengindikasikan bahwa aturan yang telah dibuat belum dijalankan secara optimal.

Indonesia memang memiliki kekayaan alam melimpah dan mampu menyediakan sumber bagi kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya angka kemiskinan masih cukup tinggi. Ini tentu tidak terlepas dari tidak optimalnya pengelolaan

serta distribusi kekayaan alam. Sebagai contoh bahwa pengelolaan sumber daya air yang kurang baik bisa meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Sebagai contoh bahwa sumber daya alam seperti tambang, jika tidak dikelola dengan baik bisa mengakibatkan air sungai tercemar. Tidak berfungsinya air sungai sebagai sumber air bersih menyebabkan rumah tangga miskin harus membeli air bersih, setidaknya untuk minum, atau terpaksa mengkonsumsi air yang tercemar tersebut. Akibatnya mereka terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air tersebut. Hal itu tentu akan menambah pengeluaran masyarakat miskin.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun penyebab kemiskinan di kelurahan Tanjung Hilir berkaitan dengan sistem kebijakan yang tidak optimal dalam melaksanakan program PKH serta kurangnya upaya dalam mewujudkan rencana pembangunan dalam RPJM sehingga masih rendahnya akses masyarakat terhadap

pendidikan, kurangnya penyediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sarana dan prasarana ekonomi, masih tingginya pengangguran akibat kurangnya penyediaan peluang kerja, tidak adanya bantuan modal dan serta pelatihan keterampilan. Dengan melihat berbagai penyebab kemiskinan yang telah dipaparkan maka bentuk kemiskinan masyarakat di Tanjung Hilir merupakan bentuk kemiskinan struktural sebagai akibat dari struktur yang menyebabkan kurangnya pemerataan pembangunan.

2. Saran

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat penulis menyarankan bahwa diperlukan upaya yang serius dan kerja sama berbagai pihak. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan, baik program berskala nasional maupun daerah. Penyediaan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam kategori usia sekolah tampaknya merupakan upaya strategis yang perlu di dorong pemerintah.

Penulis menyarankan agar pemerintah perlu melakukan peningkatan keterampilan usaha dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, memberikan jaminan sosial kesehatan, peningkatan akses sanitasi dan air bersih bagi masyarakat miskin di Tanjung Hilir serta membangun sarana dan prasarana ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang layak agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, B. (2012). *Kemiskinan: Agenda Menunggu Pemecahan*. Bahan Kuliah Geografi Sosial.
- Jamasy, O. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- Nawawi, I. (2009). *Pembangunan dan Problem Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nugroho, H. (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sandro Jaya

Rujukan Elektronik

Bahrum, S. (2011). *Kemiskinan Struktural dari Perspektif Teoritis*. di akses pada tanggal 16.01.2015 dari <http://www.haluankepri.com/opini-kemiskinan-struktural-dariperspektif-teoritis.html>

BPS. (2013). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin*: di akses pada tanggal 27.03.2014 dari http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek

Kamaluddin, R. (2004). *Kemiskinan Perkotaan di Indonesia*. Di unduh pada tanggal 25.06.2014 dari <http://www.bappenas.go.id/files/3513/5022/6052/rustian.pdf>

Samosir, A.S. (2012). *Dampak Program Dana Bergulir Pnpm Mandiri Perkotaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Tesis Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatera Utara di unduh pada tanggal 27.04.2014 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstr>

<eam/123456789/3502/4/Chapter%20II.pdf>

Suparyanto. (2011). *Masyarakat Miskin*. Diakses pada tanggal 25.06.2014 dari <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/04/masyarakat-miskin-maskin.html>

Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Mulidimensional*. Jurnal Penelitian. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. di unduh pada tanggal 19.08.2014 dari <http://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/download/2927/2646>

Waskitho. (2010). *Kemiskinan Versi Pemerintah*. di akses pada tanggal 17.12.2014 dari <https://crackbone.wordpress.com/kemiskinan-versi-pemerintah-indonesia>



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FIRDIS
NIM / Periode lulus : E51110039
Tanggal Lulus : 20-2-2015
Fakultas/ Jurusan : FISIP / SOSIOLOGI
E-mail address/ HP : firdisfalhem@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Sosiologique* (*) pada Program Studi *Sosiologi* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

POTRET KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK
(Studi Tentang kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal *Viza Juliansyah, S.Sos, MA, M.Pd*

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 6-9-2015

NIP. 080 071420 0501 1009

NIM. E51110039

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)